











© Foto oleh Anwar Holil/INOVASI

Periode Program: Fase 1: 2016–2020, Fase 2: 2020–2023, Fase 3: 2024–sekarang

Fokus: Keterampilan dasar, disabilitas dan inklusi sosial, kesetaraan gender, praktik mengajar, kurikulum dan asesmen, serta perencanaan dan kebijakan lokal.

Kabupaten/Kota Mitra: Lumajang, Tuban, Sidoarjo, Probolinggo

Peserta Program: 13 SD (Sekolah Dasar) dan 7 Madrasah (Fase 3)

Mitra: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, LSM, organisasi masyarakat sipil/keagamaan, HWDI, serta pihak swasta terkait.



Latar Belakang

Jawa Timur, provinsi terpadat kedua di Indonesia dengan lebih dari 41 juta jiwa, adalah pusat budaya dan ekonomi dengan warisan Islam yang kuat. Provinsi ini memiliki jumlah madrasah terbanyak di Indonesia, mencerminkan lanskap pendidikan yang unik.

Meskipun hasil belajar di Jawa Timur secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional, kesenjangan masih besar antar 38 kabupaten/kota, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah umum dan madrasah.

Pemerintah mulai memprioritaskan pendidikan inklusif sebagai jalur menuju pembangunan nasional. Dengan keragaman geografis, kekayaan budaya, serta tantangan sistemik, Jawa Timur menjadi wilayah kunci untuk menguji dan memperluas inovasi pendidikan.

Program INOVASI

INOVASI Fase 3 adalah program kemitraan utama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pendidikan. Program ini mendukung pemerintah Indonesia agar semua siswa sekolah dasar, tanpa terkecuali, menguasai keterampilan dasar.

INOVASI mendukung pengembangan kebijakan dan implementasi pada bidang kurikulum dan asesmen, praktik mengajar, kepemimpinan sekolah, GEDSI (gender equality, disability, social inclusion), serta perubahan iklim.

Di Jawa Timur, INOVASI bermitra erat dengan LP Ma'arif NU dan Muhammadiyah, memanfaatkan jaringan luas sekolah dan madrasah untuk memperluas jangkauan serta menjamin keberlanjutan inisiatif.

Sorotan Program



Tujuan Jangka Pendek 1: Peningkatan Kurikulum, Asesmen, dan Praktik Mengajar

Tantangan:

- Kompetensi guru bervariasi antar kabupaten; daerah seperti Probolinggo dan Sumenep memiliki skor rendah yang berdampak pada literasi dan numerasi siswa.
- Program pelatihan guru belum memadai dalam membekali keterampilan literasi dasar.
- Distribusi guru tidak merata antara kota dan desa, serta sekolah umum dan madrasah.

Apa yang kami lakukan:

- Bekerja sama dengan LPTK untuk mengembangkan kursus yang mengintegrasikan teori literasi dan pedagogi praktis (misalnya penggunaan big book, asesmen diagnostik).
- Mengintegrasikan kursus tersebut dalam program pelatihan di Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan NTT.

Mendukung implementasi *Deep Learning*, Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan karakter, dan keterlibatan komunitas.



Tantangan:

Kabupaten Probolinggo menghadapi kekurangan guru dan distribusi sumber daya yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diterapkanlah pembelajaran multi-grade dengan menggabungkan kelas dari berbagai tingkat untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pada awalnya, guru kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran multi-grade, terutama dalam perencanaan pembelajaran, manajemen kelas, dan keterlibatan siswa.





Menerapkan pembelajaran multi-grade adalah strategi efektif untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah dasar terpencil, sekaligus memastikan layanan pendidikan berkualitas.

— **Fathur Rozi,** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

Apa yang kami lakukan:

INOVASI mendukung pelaksanaan pembelajaran multigrade di delapan sekolah percontohan, dengan hasil yang signifikan:

- Skor literasi meningkat 28%, sementara skor numerasi naik hingga 18 poin.
- Materi pelatihan khusus untuk guru dikembangkan dan diterapkan di seluruh kabupaten.

Berdasarkan keberhasilan ini, INOVASI berencana memperluas penerapan pembelajaran multi-grade ke kabupaten lain, serta menjajaki integrasi pendidikan anak usia dini dengan sekolah dasar untuk memperluas akses dan inklusi.



Tantangan:

Perbedaan kualitas kepemimpinan sekolah antar kabupaten menghambat capaian pendidikan. Banyak kepala sekolah dan guru tidak memiliki akses pada kesempatan pengembangan profesional, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam mengelola sekolah secara efektif.

Tanpa kepemimpinan yang kuat, sekolah kesulitan menerapkan praktik inklusif dan inovatif, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan mutu antar wilayah.

Apa yang kami lakukan:

INOVASI berkolaborasi dengan dinas pendidikan daerah dan kelompok kerja kepala sekolah untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan, antara lain melalui:

- Mengembangkan program bersama BBGP dan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan kepemimpinan yang teridentifikasi.
- Mendukung kepala sekolah dalam menerapkan praktik inklusif dan meningkatkan kinerja sekolah.

Pada 2025, INOVASI akan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan program pelatihan kepemimpinan serta mendorong kolaborasi di tingkat kabupaten agar perbaikan yang dicapai dapat berkelanjutan.



Tantangan:

Walaupun anak laki-laki dan perempuan di Jawa Timur memiliki akses pendidikan yang setara, kesenjangan masih ada. Anak perempuan secara konsisten mengungguli anak laki-laki dalam literasi dan numerasi, tetapi stereotip gender dalam buku teks, praktik mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler membatasi aspirasi keduanya. Kurikulum tersembunyi memperkuat bias ini, sehingga memengaruhi partisipasi dan cita-cita siswa.

Guru dan komunitas sekolah sering kali kurang menyadari adanya bias gender serta dampaknya.

Apa yang kami lakukan:

INOVASI melaksanakan Program Sekolah Responsif Gender di 10 sekolah di Jawa Timur dengan menjangkau 2.521 siswa. Hasil utama mencakup:

- 90% sekolah menyediakan toilet terpisah dan perlengkapan sanitasi.
- 80% sekolah menampilkan pesan anti-perundungan dan anti-kekerasan.
- 35% sekolah mengintegrasikan tema kesetaraan gender dalam bahan bacaan.

Toolkit Safe and Supportive School yang dikembangkan INOVASI menyederhanakan pendekatan responsif gender untuk penggunaan yang lebih luas. Kemitraan dengan pemerintah daerah dan sekolah telah meningkatkan penerimaan serta integrasi praktik ini. Ke depan, INOVASI akan fokus pada penguatan dukungan pemerintah daerah dan integrasi strategi responsif gender dalam kerangka kerja nasional.



Tantangan:

Perkawinan anak tetap menjadi isu mendesak di Jawa Timur, terutama di Probolinggo dan Sumenep, yang menyumbang angka putus sekolah tinggi pada anak perempuan. Meskipun regulasi telah menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, sikap masyarakat dan ketiadaan kebijakan di tingkat sekolah memperburuk masalah ini.

Pandemi COVID-19 memperparah situasi, dengan lonjakan permohonan dispensasi perkawinan. Siswa yang menikah jarang kembali ke sekolah karena stigma dan minimnya dukungan dari komunitas sekolah.

Apa yang kami lakukan:

INOVASI mengalihkan pendekatan dari fokus pada pemerintah pusat menjadi bekerja langsung dengan pemangku kepentingan lokal. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Mengintegrasikan pesan pencegahan perkawinan anak dalam program literasi.
- Bermitra dengan sekolah untuk mengidentifikasi solusi berbasis lokal.

Rencana berikutnya mencakup uji coba pendekatan terpadu yang menggabungkan pencegahan perkawinan anak dalam kurikulum, serta advokasi kebijakan tingkat sekolah yang mendukung siswa menikah agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.



FOTO INOVASI JATIM © Foto oleh Anwar Holil/INOVAS



f @InovasiPendidikanAIP



NOVASI Pendidikan

Program INOVASI (Innovation for Indonesian School Children) adalah kemitraan utama antara pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan dasar. Mitra INOVASI mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama dengan mitra di kabupaten dan provinsi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku, dan Ibu Kota Nusantara. INOVASI dikelola oleh Palladium atas nama Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), dan resmi dimulai pada Januari 2016.